



KOMITE PERCEPATAN
TRANSFORMASI DIGITAL
PEMERINTAH

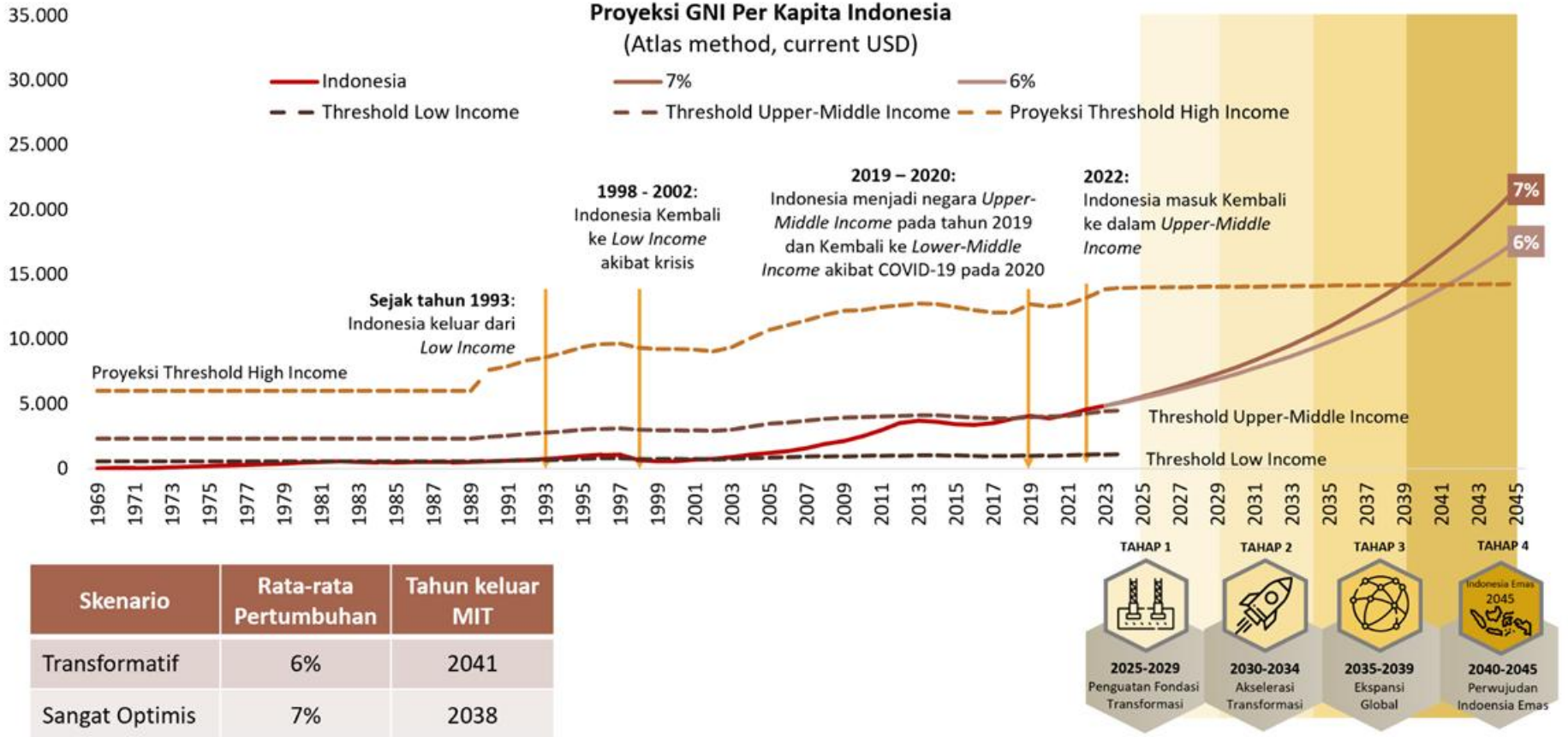
SAMBUTAN KETUA KOMITE PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH

PELUNCURAN RENCANA INDUK PEMERINTAH DIGITAL NASIONAL 2025–2045

JEND. TNI (PURN) LUHUT B PANJAITAN

JAKARTA, 26 FEBRUARI 2026

Tantangan Berat Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045: Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan pertumbuhan dan produktivitas yang lebih tinggi, 5-10 Tahun ke Depan Menjadi Kunci



Transformasi Digital Menjadi Pengungkit Utama agar Negara Tidak Terjebak dalam Stagnasi Pembangunan

Studi ADB (2020):



Teknologi dan inovasi secara historis telah menjadi pendorong utama perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi.



- Adopsi teknologi diestimasi menambah nilai ekonomi Indonesia sebesar **USD2,8 triliun pada 2040.**
- Menambah rata-rata **0,55% per tahun pada PDB hingga 2040.**

Pengembangan Teknologi:

Emerging Technologies: Photonics, Biotech, Nanotech, Advanced Materials, Energy Tech.

ICT: IoT, Big Data, AI, Machine Learning, 3D Printing

PILAR PENDUKUNG:

1

Infrastruktur & lembaga inovasi yang maju

2

Pemahaman nilai bisnis teknologi baru

3

Alih teknologi dan dukungan teknis

4

Solusi teknologi berbiaya rendah

5

Tenaga kerja yang melek teknologi

Sumber: ADB, "Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation" (2020)



Indonesia Memiliki Potensi untuk Mengimplementasikan Transformasi Digital untuk Mendukung Pencapaian Target Visi 2045

Digitalisasi berperan penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia



TOTAL POPULASI



278,7 juta

Penduduk Perkotaan

58,9%

PEMAKAI HP



353,3 juta

vs populasi

126,8%

USIA PRODUKTIF



190 mio

vs populasi

69,3%

GEN Z – MILLENNIALS



128 mio

vs populasi

45.8%

Data 2024

Pengguna Internet: 79,5%¹
Internet Adoption Index vs. Global: 100.5²

Digital Native

Bonus Demografi Didukung oleh
Penduduk Usia Produktif

PANDEMI COVID-19 MEMPERCEPAT TINGKAT ADOPSI DIGITAL

37%



**Konsumen Baru
Ekonomi Digital³**
Pasca Pandemi Covid-19

93%



**Konsumen Baru
Ekonomi Digital³**
Akan terus memanfaatkan produk
ekonomi digital pasca Covid-19

45%



Pelaku Bisnis Aktif³
Melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi COVID-19

1 dari 5





Pelaku Usaha³
Yang lebih aktif berjualan e-commerce adalah pengguna baru

Namun, Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kita Masih Menghadapi Tantangan Struktural yang Serius dalam Tata Kelola dan Transformasi Digital Pemerintahan

INFRASTRUKTUR

 Penetrasi Internet Indonesia: **79,50% (2024)**


 **12.548** desa belum memiliki akses internet (2022)²

 Kecepatan unduh internet seluler rata-rata di Indonesia : **24.53 Mbps**³

SDM & LITERASI DIGITAL

 Dari **64 juta** UMKM, hanya **25,5 juta** yang sudah terdigitalisasi (2024)⁴

 Literasi digital belum optimal


 Kurangnya talenta digital untuk memenuhi kebutuhan industri

 Ego Sektoral dan Fragmentasi Layanan


REGULASI

 Lemahnya keamanan siber dan keamanan data konsumen

 Banjir produk impor Harga murah

 Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi yang Tidak Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

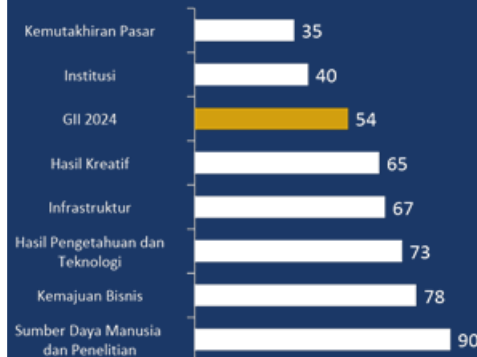
 Belum ada regulasi nasional yang komprehensif tentang AI

 Risiko Kedaulatan Digital dan Ketergantungan pihak asing (*Vendor Lock-In*)

Berdasarkan Indeks Inovasi Global (GI, 2024), Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 133 negara di dunia. ⁵⁾

Year	GI	Innovation Input	Innovation Output
2022	75	72	74
2023	61	64	63
2024	54	54	67

7 Pilar Pemeringkatan GI Indonesia



*) Rank among 132

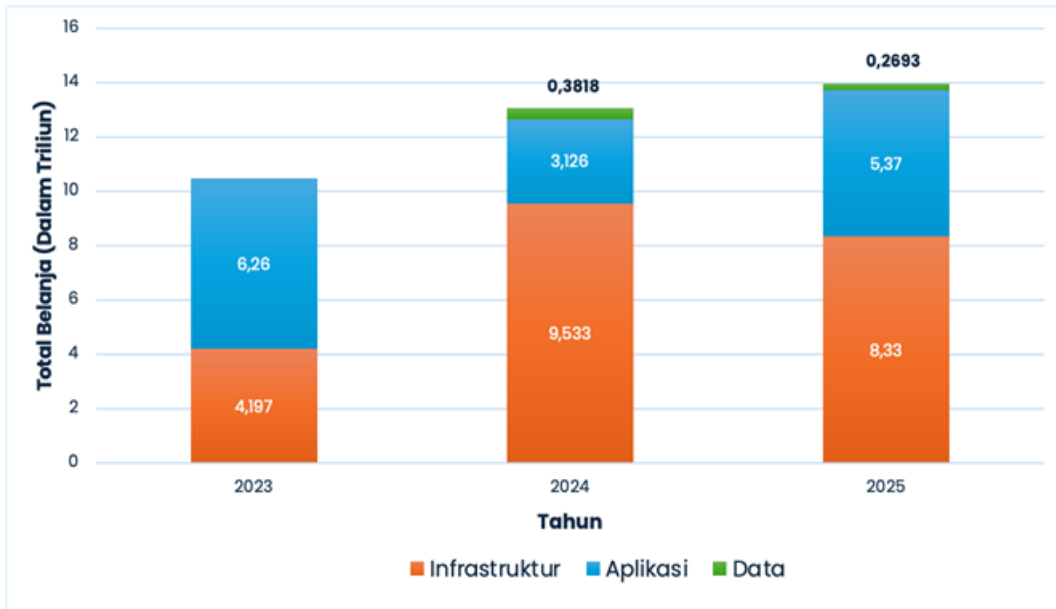
Praktik Digitalisasi yang Dijalankan Selama ini masih Terfragmentasi dan Berorientasi pada Pembuatan Aplikasi Sektoral, mengakibatkan Pemborosan Anggaran dan Layanan Tidak Efektif (24.400 aplikasi K/L)

K/L	Jumlah Aplikasi				Total SPBE
	Pemerintah (G2G)	Masyarakat (G2C)	Pelaku Usaha (G2B)	Internal (G2E)	
Kementerian ESDM	28	43	21	9	101
Kementerian Perhubungan	44	30	27	8	109
KKP	71	6	27	14	118
KLHK	198	75	26	33	332
Kementerian Parekraf	10	32	11	52	105
Kementerian Investasi (BKPM)	2	7	5	4	18
Kementerian PUPR	8	249	5	157	419
LKPP		16		4	20
Tabel 1. Jumlah Aplikasi di 7 K/L dan LKPP Sumber: BPKP, 2 Maret 2023					1.222

Permasalahan utama adalah inefisiensi birokrasi yang tercermin pada “**kesemrawutan**” dengan adanya 1.222 dari **24.400 aplikasi di 7 K/L dan LKPP**, sehingga membuat (1) kebingungan masyarakat, (2) pemborosan APBN/APBD, dan (3) ketidakpastian bagi investor

Belanja TIK Pemerintah 37+ Triliun dalam 3 Tahun, Tetapi Sejauh ini Belum Terdapat Signifikansi Dampak Terhadap Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

Tren Belanja TIK Instansi Pusat



Sumber data:

Usulan clearance belanja TIK Pemerintah Pusat (pemerintah daerah saat ini belum ada mekanisme clearance) per Agustus 2025

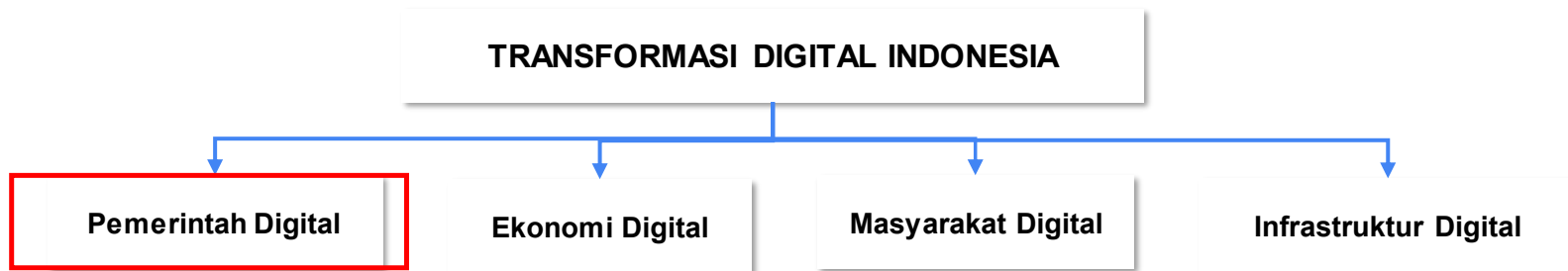


Keterangan

- **Infrastruktur:** Pembelian server, media penyimpanan (*storage*), pemeliharaan pusat data, perangkat jaringan, sewa rak, sewa layanan komputasi awan, penambahan kapasitas.
- **Aplikasi:** belanja yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan aplikasi dan lainnya.
- **Data:** belanja yang berkaitan dengan pengelolaan data di instansi pusat.



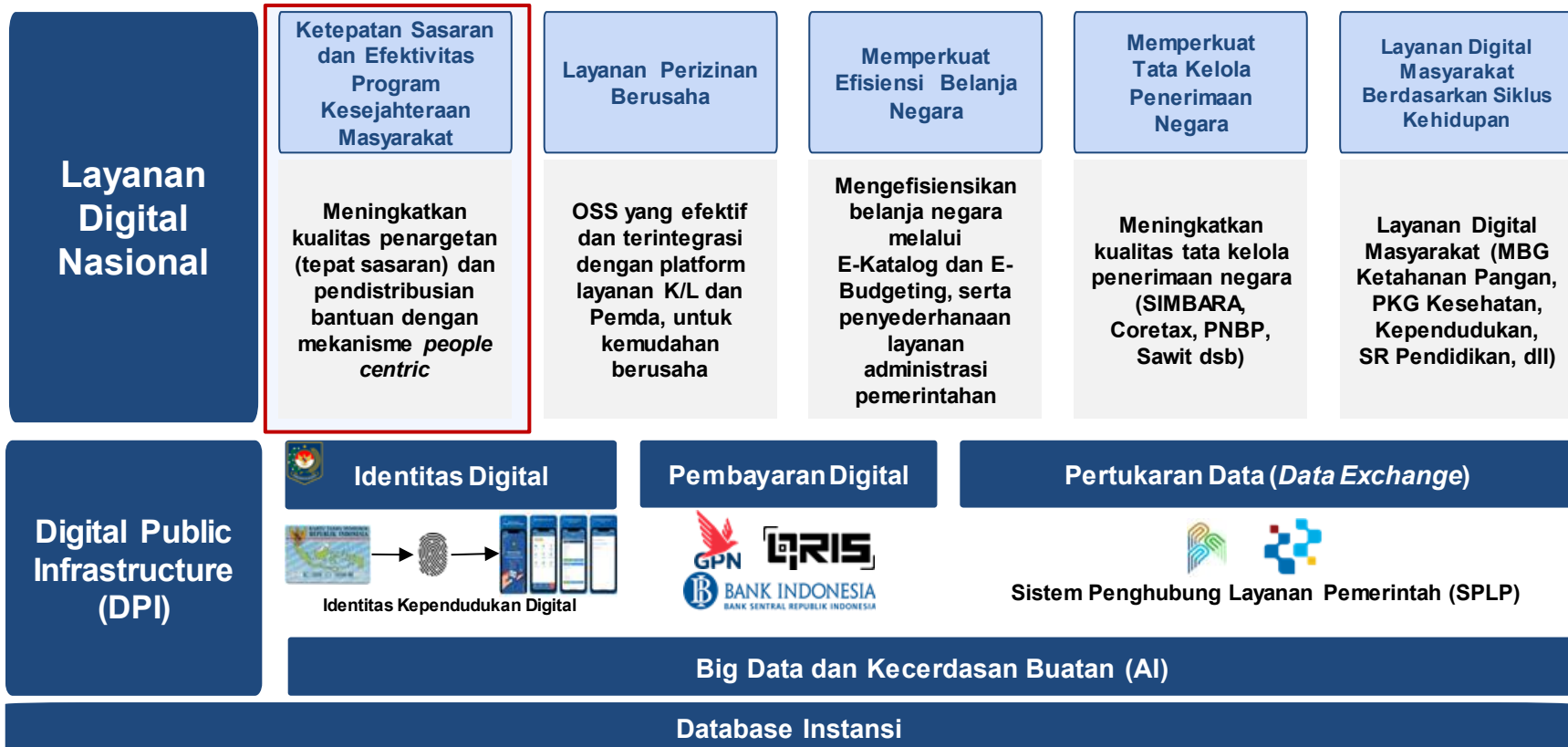
Pengembangan Pemerintah Digital merupakan Unsur Penting dalam Rangka Transformasi Digital di Indonesia. Transformasi Digital Pemerintah Harus Menyentuh Proses, Struktur, Dan Budaya Kerja



Komponen Utama	Uraian Tujuan
Pemerintah Digital	Transformasi layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui sistem digital yang efisien akan: <ol style="list-style-type: none">Memperkuat tata kelola pemerintahanMeningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publikMendorong transparansi
Ekonomi Digital	Memperkuat ekonomi melalui inovasi digital, termasuk e-commerce, fintech, digitalisasi UMKM, dan pengembangan Industri 4.0.
Masyarakat Digital	Meningkatkan literasi digital, memberdayakan masyarakat, dan memastikan partisipasi aktif dalam ekosistem digital
Infrastruktur Digital	Membangun infrastruktur digital yang kuat, seperti perluasan jaringan broadband, pengembangan 5G, dan peningkatan keamanan siber.



Transformasi Digital Pemerintah melalui Implementasi Infrastruktur Digital Publik (DPI) sebagai Enabler Program Prioritas Nasional untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik



**Transformasi Digital merupakan Senjata Ampuh Lawan Korupsi.
Ketika Semua Proses Berjalan Digital & dapat Diaudit Otomatis Ruang Gerak Korupsi Menyempit Secara Signifikan**

Tidak ada yang bisa disembunyikan

Akuntabilitas bukan pilihan, namun keharusan karena akan tercatat oleh sistem digital

Kebocoran terdeteksi di awal, hal ini penting karena masalah korupsi ini tidak terdeteksi sejak awal sehingga menganga

Sudah teruji dalam pemanfaatan e-katalog dan simbara yang bisa mendeteksi *fraud* dan menutup kebocoran triliunan rupiah



Peran Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memastikan Implementasi Transformasi Digital Pemerintah berjalan dengan baik

Monitoring dan Evaluasi Progres Implementasi Digitalisasi Layanan Pemerintah melalui Indikator dan sasaran kinerja

Tidak toleransi pada perlambatan progress, mencatat *blocker*/penghambat transformasi digital pemerintah

Mendorong percepatan: Intervensi aktif di titik-titik kemacetan lintas kementerian

Koordinasi *whole-of-government*: memastikan semua K/L bergerak dalam satu visi dan arah yang sama





KOMITE PERCEPATAN
TRANSFORMASI DIGITAL
PEMERINTAH

TERIMA KASIH

JAKARTA, 26 FEBRUARI 2026